

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila SMK/MAK XI Kur. Merdeka

Bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yuk, Asah Literasimu! 1

Soal 1

A. Mengkaji secara komprehensif rancangan undang-undang yang sedang disusun

Soal 2

Berdasarkan teks, tentukan pernyataan benar atau salah dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tepat.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Tahap akhir dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah harmonisasi, yaitu mencari kesesuaian atau keselarasan pada peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.		✓
2.	Proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan.	✓	
3.	Pada acara yang berfokus pada harmonisasi materi tersebut, para peserta juga memastikan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.		✓
4.	Acara diskusi yang dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pengecekan kembali akan draft rancangan.	✓	
5.	Proses harmonisasi untuk menghasilkan peraturan yang aspiratif dan responsif menuntut adanya kerja sama antara seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyusunannya.	✓	

Uji Kemampuan Diri 1

Pilihan Ganda

No.	Kunci Jawaban
1.	A
2.	A
3.	B
4.	A
5.	B
6.	B
7.	A
8.	A
9.	C
10.	C

Yuk, Asah Literasimu! 2

Soal 1

C. Pemerintah daerah

Soal 2

Berdasarkan teks, tentukan pernyataan sesuai atau tidak sesuai dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tepat.

No.	Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Dalam sistem hukum nasional, peraturan daerah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.		✓
2.	Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah pusat dapat memberi tugas kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		✓
3.	Institusi pemerintahan dan pejabat daerah mempunyai	✓	

	kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lain.		
4.	Urusan pemerintahan terkait agama adalah salah satu kewenang pemerintah pusat yang dapat didelegasikan kepada daerah sesuai asas tugas pembantuan.		✓
5.	Pemerintah daerah dapat menarik investasi asing agar dapat berinvestasi di daerahnya demi meningkatkan perekonomian masyarakat.		✓

Uji Kemampuan Diri 2

Pilihan Ganda

No.	Kunci Jawaban
1.	D
2.	C
3.	B
4.	B
5.	D
6.	A
7.	E
8.	E
9.	C
10.	C

Yuk, Asah Literasimu! 3

Soal 1

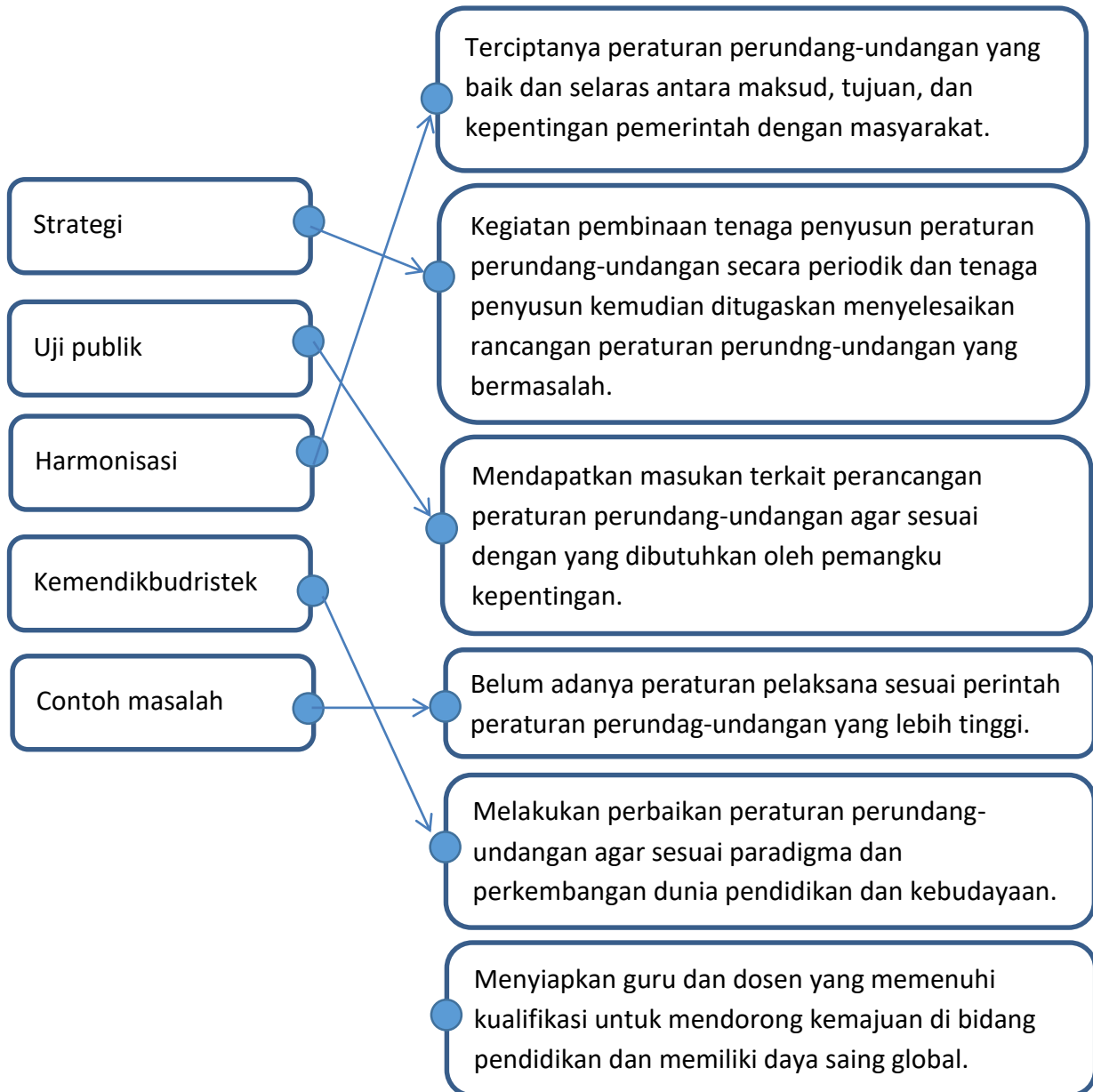
Berdasarkan teks, tentukan pernyataan ada atau tidak ada dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tepat.

No.	Pernyataan	Ada	Tidak
-----	------------	-----	-------

			Ada
1.	Apakah yang mendorong penyesuaian regulasi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan?	✓	
2.	Siapakah yang menginisiasi penyesuaian regulasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan?	✓	
3.	Bagaimana Kemenbudristek menyelesaikan permasalahan regulasi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan?	✓	
4.	Kapan regulasi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan dilakukan?		✓
5.	Mengapa rancangan peraturan perundang-undangan tentang dunia pendidikan dan kebudayaan perlu diajukan uji publik?		✓

Soal 2

Berdasarkan teks, pasangan dengan menarik garis antara kata/frasa di kolom sebelah kiri dan keterangan yang sesuai di kolom sebelah kanan.



Uji Pemahaman Diri 3

Pilihan Ganda

No.	Kunci Jawaban
1.	A

2.	A
3.	D
4.	A
5.	B
6.	D
7.	E
8.	A
9.	E
10.	E

Yuk, Asah Literasimu! 4

Soal 1

A. masyarakat

Soal 2

Berdasarkan teks, tentukan pernyataan sesuai atau tidak sesuai dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tepat.

No.	Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap wajib ditaati masyarakat.	✓	
2.	Orang-orang yang menyadari peraturan akan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku.	✓	
3.	Kesadaran hukum yang ditunjukkan dengan sikap positif terhadap hukum yang berlaku.	✓	
4.	Orang yang sadar hukum tidak sekadar mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami isinya.	✓	
5.	Masyarakat perlu menaati peraturan-peraturan yang hanya ditetapkan oleh lembaga berwenang.		✓

Uji Pemahaman Diri 4

Pilihan Ganda

No.	Kunci Jawaban
1.	E
2.	C
3.	E
4.	D
5.	A
6.	E
7.	B
8.	D
9.	C
10.	B

Soal Latihan Bab 2

Pilihan Ganda

No.	Kunci Jawaban
1.	D
2.	C
3.	A
4.	C
5.	B
6.	D
7.	B
8.	E
9.	D
10.	D
11.	B
12.	C

13.	C
14.	A
15.	C
16.	C
17.	D
18.	A
19.	E
20.	E

Esai:

1. Dalam UU No 10 Tahun 2004 hierarki peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketetapan MPR sedangkan dalam UU No 13 Tahun 2022 Ketetapan MPR telah ada dan berada dalam urutan 2 dibawah UUD NRI 45 dan diatas UU/PERPPU.
2. Peraturan perundang-undangan dibuat produk hukum yang akan menjadi pedoman dalam berkehidupan dan berbangsa di negara. Ketika pembuatan perundang-undangan selaras, maka akan tercipta sebuah aturan yang saling melengkapi satu sama lain dan bisa mewujudkan tujuan tertentu. Tetapi ketika terjadi ketidaklarasan dan adanya ketidaksinergis antar peraturan yang dibuat dengan yang lain, maka akan terjadi tumpang tindih dan menjadi ambiguitas di tenga kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di tengah masyarakat.
3. Materi muatan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
 - a. Ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi negara dan pemerintahan.
 - b. Ketentuan-ketentuan tentang rakyat.
 - c. Ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara, seperti bahasa, lambang, dan bendera.
 - d. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara.
 - e. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
4. Karena jika suatu negara tak memiliki undang-undang, saat menghadapi suatu masalah negara tersebut akan terombang-ambing dan tidak akan menemukan solusi dalam

memecahkan masalah karena undang-undang juga termasuk pondasi untuk membentuk suatu negara.

5. Hierarki peraturan perundang-undangan pada UU No 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.
 - a. UUD NRI Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. UU/Perppu
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
6. Kenusantara, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Suatu negara memerlukan konstitusi dikarenakan konstitusi merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara, apabila tidak memiliki dasar yang jelas serta aturan-aturan yang belum dibuat maka negara tidak dapat menjalankan pemerintahannya serta dapat terjadi kekacauan didalam pemerintahan dan dimasyarakat. analoginya ibarat sebuah rumah tanpa pondasi, yang mana rumah tersebut tidak dapat berdiri atau bahkan bisa roboh.
8. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
9. Proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan

perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya sama dalam hierarki dengan peraturan yang diubah.

10. Sikap taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undang di sekolah sebagai berikut:
 - a. Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas.
 - b. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Tekun belajar.
 - d. Menjaga kebersihan sekolah.
 - e. Membuang sampah pada tempatnya.
 - f. Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok.
 - g. Mengerjakan pekerjaan rumah.

Soal Tipe AKM

Soal 1

Pernyataan			Keterangan
Kode Etik	•	•	Merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu) dan merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif
Peran	•	•	Menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh penentu kebijakan dan merumuskan substansi secara konsisten dan taat asas
Kewajiban	•	•	Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
Tugas Pokok	•	•	Tidak berpihak, adil, pemecah masalah, dan mempunyai banyak alternatif solusi
Pelaksana Peran	•	•	Menerima atau menolak saran dan kritik dari pemerhati peraturan perundang-undangan maupun dari masyarakat umum
		•	Tercipta produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif, dan responsif sehingga pembangunan hukum nasional akan makin baik.

Soal 2

No.	Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Asas-asas seperti kejelasan tujuan dan asas kenusantaraan adalah bagian dari asas-asas yang harus dipahami perancang peraturan perundang-undangan.		√
2.	Menggunakan diksi yang jelas sehingga tidak		√

	menimbulkan tafsiran adalah salah satu kode etik yang harus dipegang oleh para perancang peraturan perundangundangan		
3.	Rumusan peraturan perundang-undangan dengan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif menunjukkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan dengan telah melaksanakan perannya dengan baik.	√	
4.	Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah salah satu ketentuan penting yang harus diperhatikan para perancang peraturan perundang-undangan	√	
5.	Jika para perancang peraturan perundang undangan tidak melaksanakan kode etik yang ditetapkan bagi mereka, dampaknya akan terlihat pada produk peraturan yang dihasilkan.	√	

Soal 3

Dengan dilaksanakannya kewajiban dari seorang pembuat kebijakan, maka produk hukum yang akan tercipta produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif, dan responsif sehingga pembangunan hukum nasional akan makin baik. Begitu pun mengenai peran dari seorang pembuat kebijakan, dengan dilaksanakannya peran dengan baik dan benar maka proses perumusannya seperti dalam aspek substansi tidak akan menimbulkan penafsiran (ambigu) dan tercipta substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif, Untuk kode etik sendiri harus di tegakkan dan ditanamkan di diri masing-masing untuk semua pembuat kebijakan. Agar tidak terjadi keberpihakan, adil, pemecah masalah, dan mempunyai banyak alternatif solusi.

Soal 4

Semakin tinggi kesadaran hukum warganya, semakin mudah penegakan hukum untuk memajukan suatu negara.

Soal 5

No.	Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Saat lampu merah menyala, Anton menghentikan kendaraannya.	√	
2.	Fajar mengetahui bahwa saat lampu merah menyala, ia harus menghentikan kendaraannya.	√	
3.	Cecep sadar bahwa menghentikan kendaraan saat lampu merah menyala sangat penting demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan bersama dalam berlalu lintas.	√	
4.	Yati memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi menerobos lampu merah di jalan raya.		√
5.	Diva menegur dan mengingatkan seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm bahwa hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.	√	